

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul

1. Sejarah Singkat Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul memang tak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul banyak menyimpan kisah kepahlawanan. Antara lain, perlawanan pangeran Mangkubumi dan Ambar Ketawang dan upaya Sultan Agung di Pleret. Perjuangan pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto, pesawat yang ditumpanginya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jendral Sudirman (1948) yang banyak bergerak di sekitar Bantul. Wilayah ini pula yang menjadi basis, "Serangan Monumen 1 Maret" (1949) yang dicituskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Awal pembentukan wilayah kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintahan Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani

Kontrak kesunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerangan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam kesultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga Kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Deggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk wilayah timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 saptar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya dikenal dengan Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati.

Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati Hari jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikorbankan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa penduduk Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangkan Stadsgementie Ordonantie dihapus, Kabupaten memiliki hak

Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintah ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang – undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. Dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan silih bergantinya kepemimpinan Nasional, kini Kabupaten Bantul telah mengalami kemajuan pesat diberbagai bidang dibawah kepemimpinan Drs. HM. Idham Samawi yang menjabat sejak akhir tahun 1999 dan sampai sekarang yang dipimpin oleh istri dari Drs. HM. Idham Samawi sendiri .

2. Visi dan Misi Kabupaten Bantul

a. Visi

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul ditetapkan visi daerah Kabupaten Bantul yaitu: “BANTUL PROJOTAMANSARI, SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN AGAMIS”. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang adalah Bantul yang produktif professional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan sejahtera dan demokratis yang semuanya itu akan

Produktif dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah.

Profesional dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli dibidangnya masing-masing. Tolak ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan.

Ijo Royo – Royo dalam arti tidak ada sejengkal tanah pun yang diterlantarkan sehingga baik di musim hujan baik musim kemarau dimanapun akan tampak suasana yang rindang. Dalam hal ini perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa bagaimana pun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat di masa mendatang.

Tertib dalam arti bahwa setiap warga Negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintah dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin Nasional.

Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan

dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

Sehat dalam arti tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia yang menghuninya.

Asri dalam arti bahwa upaya pengaturan tata riang di desa dan di kota dapat serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menimbulkan perasaan kerasan, asri tidak mewah tetapi cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang berstandar pada kreativitas manusiawi. Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bantul telah terpenuhi secara lahir dan batin.

Demokratis dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab.

Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Bantul senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama

...sertainsa dapat ditumbuhkan dalam interaksi sosial sehari-hari

b. Misi

- 1) Mewujudkan kesejahteraan dengan prioritas mencerdaskan dan meningkatkan drajat kesejahteraan masyarakat yang didasarkan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab.
- 3) Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin tegaknya supermasi hukum.
- 4) Mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas, dan nilai tambah hasil-hasil potensi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3 Bentuk dan Lambang Daerah

Bentuk dasar lambang daerah Kabupaten Bantul adalah elips (bulat panjang) yang merupakan gabungan teratai berkelopak lima. Di bawah lukisan bentuk dan dasar terdapat gambar pita bertuliskan “KABUPATEN BANTUL”. Di dalam bentuk Elips (bulat panjang) yang merupakan bunga Teratai Berkelopak Lima berisi lukisan yang menggambarkan keadaan alam, kekayaan alam, latar belakang sejarah, semangat dan cita-cita, persatuan/kesatuan, ukuran lambang daerah pada garis horizontal 30 dan garis tengah vertikal 40. Arti dan makna lambang daerah sebagai berikut:

- a. Landasan Idill Pancasila
- b. Gambar bintang emas bersegi lima menggambarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
- c. Gambar pohon kelapa menggambarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
- d. Lukisan dalam warna merah, putih dari roda bergerigi menggambarkan Persatuan Indonesia.
- e. Lukisan dalam gambar sungai menggambarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- f. Lukisan dalam gambar padi dan kapas menggambarkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
- g. Landasan struktur Undang – Undang Dasar 1945 dilukiskan dalam gambar ukiran bersegi (linggih Jawa) emas dan Keris bertekuk (luk

- h. Tata kehidupan gotong royong kearah ketentraman dan kemakmuran dilukiskan dalam tulisan huruf Jawa berbunyi "HAMAMAYU HAYUNING BAWONO". Nilai-nilai keagamaan dilukiskan dalam gambar binatang emas bersegi lima
- i. Semangat perjuangan dan kepahlawanan dilukiskan dalam gambar keris dan gunung yang mengingatkan perjuangan pahlawan nasional Pangeran Diponegoro yang bermarkas di Gua Selarong pada waktu penjajah Belanda.
- j. Semangat Pembangunan dilukiskan dalam gambar roda bergigi dan untuk mencapai kemakmuran perlu dibangun industri-industri.

4. Kondisi Geografis

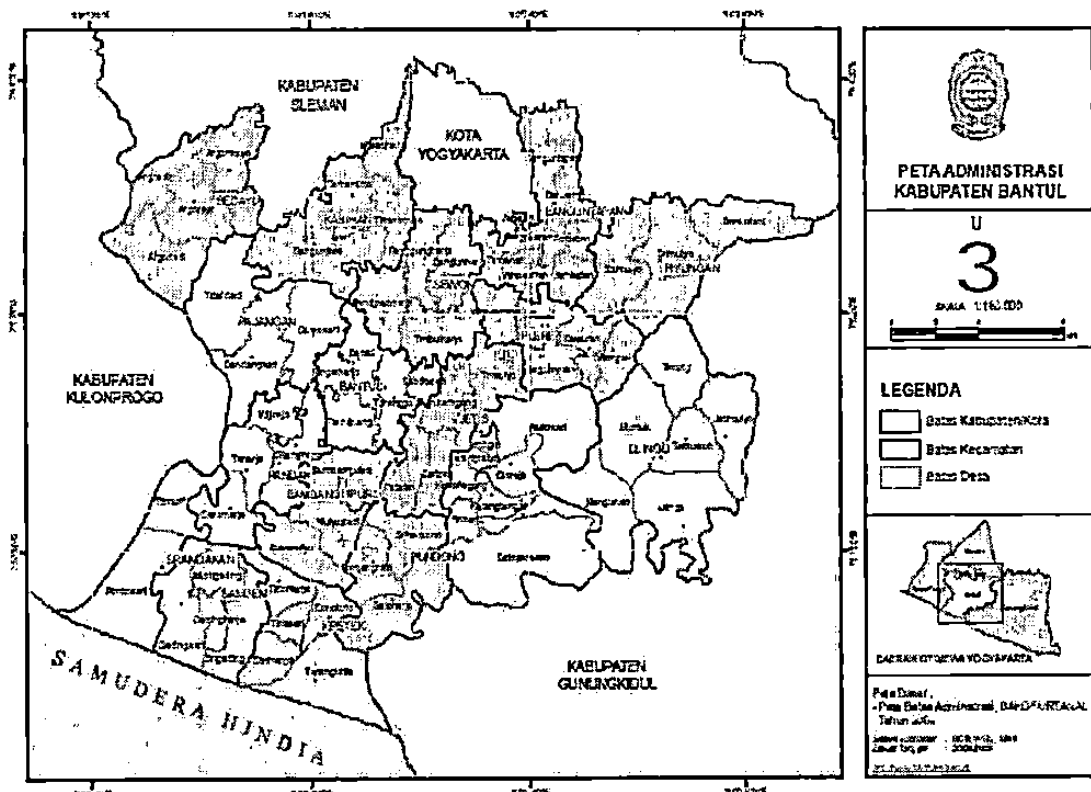
Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari lima daerah Kabupaten atau kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila dilihat bentang alamnya secara makro, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07 44' 04" - 08 00' 27" Lintang Selatan dan 110 12' 34" - 110 31' 08" Bujur Timur.

Kabupaten Bantul mempunyai wilayah seluas 506,85 km² (15,90% dari luas wilayah Propinsi DIY). Bagian barat, adalah daerah landai serta perbukitan yang membujur dari utara ke selatan seluas 89,86 km² (17,73%

merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210,94 km² (41,62%). Bagian timur adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya lebih baik dari daerah bagian barat, seluas 206,05 km² (40,65%). Bagian selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Saden dan Kretek (<http://google.co.id-geografitopografi-dan-demografi.html> akses 18 Desember 2013).

Gambar 2.2

Peta Kabupaten Bantul



Sumber : Google Maps akses 10 September 2013

5. Kondisi Demografi

a. Kepadatan Penduduk geografis

Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Hasil registrasi penduduk awal tahun 2006. Jumlah total penduduk Bantul adalah 809.971 jiwa, yang terbagi menjadi : Laki-laki = 397.261 jiwa (49,04%); Perempuan = 412.710 jiwa (50,95%); Penduduk dewasa = 607.380 jiwa (74,99%) dan penduduk anak-anak 185.906 jiwa (25,01%) berikut data penduduk Kabupaten Bantul dari tahun 2006-2010.

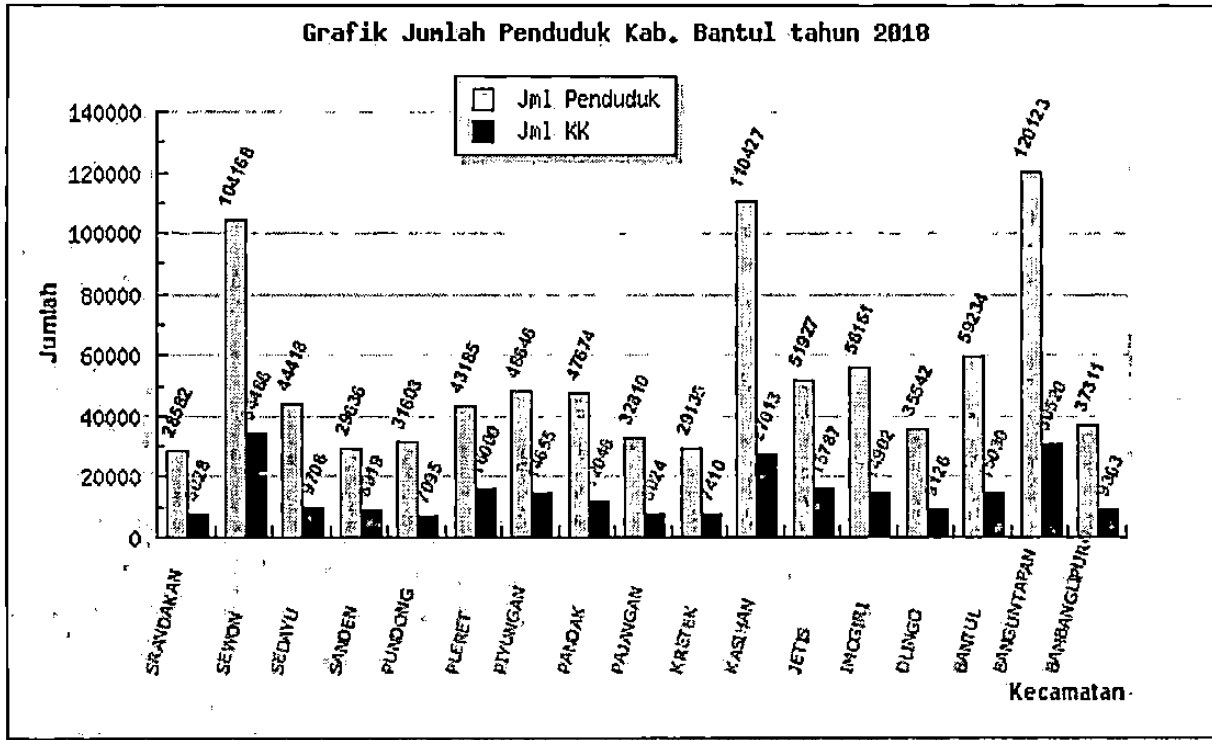
Tabel 2.1

Jumlah Penduduk dan KK Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010

Kecamatan	2006		2008		2010	
	Penduduk	KK	Penduduk	KK	Penduduk	KK
SRANDAKAN	31.012	8.610	31.102	8.943	28.582	8.028
SANDEN	34.255	10.303	34.433	10.331	29.636	8.919
KRETEK	31.479	7.945	31.809	8.173	29.135	7.410
PUNDONG	32.567	7.236	32.618	7.413	31.603	7.095
BAMBANGLIPURO	43.387	10.632	44.174	11.484	37.311	9.363
PANDAK	49.220	12.382	50.545	12.823	47.674	12.046
BANTUL	60.023	15.038	61.277	15.866	59.234	15.030
JETIS	50.359	14.904	51.398	16.272	51.927	15.787
IMOGIRI	57.500	14.496	58.744	16.528	56.151	14.902
DLINGO	37.814	9.560	38.209	9.962	35.542	9.126
PLERET	34.112	12.437	36.191	13.183	43.185	16.000
PIYUNGAN	38.481	11.313	39.206	12.301	48.646	14.655
BANGUNTAPAN	86.053	21.505	88.979	23.187	120.123	30.520
SEWON	78.090	25.503	79.948	27.795	104.168	34.486
KASIHAN	80.159	16.534	85.434	24.782	110.427	27.013
PAJANGAN	30.826	7.445	31.826	7.879	32.810	8.024
SEDAYU	45.204	9.835	46.163	10.142	44.418	9.706

Gambar 2.2

Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul tahun 2010



Sumber : PIP2BDIY tahun 2012.

b. Golongan umur

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan golongan umur tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur

No	Kecamatan	GOLONGAN UMUR				Jumlah
		0-9	10-19	20-39	40 ke atas	
1.	Bambanglipuro	7,838	8,681	12,490	13,805	42,814
2.	Banguntapan	11,868	18,983	27,762	22,066	80,679
3.	Bantul	9,058	10,269	19,910	20,188	59,425
4.	Dlingo	6,323	6,057	12,585	12,314	37,279
5.	Imogiri	9,235	10,449	17,989	19,416	57,089
6.	Jetis	9,743	9,110	17,092	20,373	56,318
7.	Kasihan	13,058	14,485	29,420	22,783	79,746
8.	Kretek	4,193	4,347	11,168	11,668	31,376
9.	Pajangan	5,791	5,327	10,482	8,989	30,589
10.	Pandak	7,450	8,433	15,766	17,245	48,894
11.	Piyungan	9,539	9,065	9,852	9,778	38,234
12.	Pleret	5,620	8,251	11,953	8,222	34,036
13.	Pundong	4,260	4,956	13,847	11,577	34,640
14.	Sanden	5,390	7,061	9,612	12,141	34,204
15.	Sedayu	7,093	7,739	15,367	14,757	44,956
16.	Sewon	10,963	14,392	29,370	22,145	76,870
17.	Srandakan	4,645	5,613	9,236	11,404	30,898
	Jumlah	132,057	153,218	3,901	258,871	818,047

Sumber: Statistik dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada golongan umur 0-9 tahun Kecamatan kasihan merupakan kecamatan dengan jumlah terbesar yaitu 13,053 dan Kecamatan Kretek dengan jumlah terkecil yaitu 4,193. Untuk golongan umur 10-19 tahun Kecamatan Banguntapan sebagai kecamatan dengan jumlah terbesar yaitu 18,983 dan Kecamatan Pundong dengan jumlah terkecil yaitu 4,956. Untuk golongan umur 20-39 tahun kecamatan Kasihan sebagai kecamatan dengan jumlah terbesar yaitu 29,420 dan Kecamatan Srandakan dengan jumlah terkecil yaitu 9,236. Untuk golongan umur 40 tahun ke

atas kembali Kecamatan Kasihan sebagai kecamatan dengan jumlah

terbesar yaitu 22,783 dan Kecamatan Pleret dengan jumlah terkecil yaitu 8,222. Dari keseluruhan golongan umur Kecamatan Banguntapan merupakan kecamatan dengan jumlah terbesar yaitu 80,679. Dan dari keseluruhan golongan umur bahwa golongan umur 20-29 tahun merupakan golongan umur dengan jumlah paling banyak yaitu 273,901.

c. Jenis Kelamin

Jumlah penduduk kabupaten Bantul berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Th. 2005			Jumlah Penduduk Th. 2007		
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Srandakan	14,256	15,173	29,429	15,157	15,976	31,133
2.	Sanden	16,611	17,584	34,195	16,674	17,678	34,352
3.	Kretak	15,091	16,225	31,316	15,226	16,478	31,704
4.	Pundong	15,982	17,123	33,105	15,746	16,815	32,561
5.	Bb.lipuro	20,836	22,460	43,296	21,249	22,747	43,996
6.	Pandak	24,103	24,718	48,821	24,795	25,201	49,996
7.	Bantul	28,970	30,339	59,309	29,749	31,050	60,799
8.	Jetis	24,474	26,009	50,483	24,851	26,232	51,083
9.	Imogiri	27,800	29,497	57,297	28,532	29,950	58,482
10.	Dlingo	18,074	19,127	37,201	18,873	19,623	38,096
11.	Pleret	17,103	17,404	34,507	17,281	17,319	34,600
12.	Piyungan	18,850	19,553	38,403	19,154	19,757	38,911
13.	Banguntapan	39,657	40,552	80,209	43,432	44,804	88,236
14.	Sewon	39,087	38,592	77,679	40,188	39,194	79,382
15.	Kasih	39,617	39,807	79,424	40,554	40,639	81,193
16.	Pajangan	14,870	15,668	30,538	15,498	16,146	31,614
17.	Sedayu	21,880	22,879	44,759	22,431	23,356	45,787
	Jumlah	397,261	412,710	809,971	408,990	422,965	831,955

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 jumlah perempuan yaitu 412,710 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki yaitu 397,261. Dan pada tahun 2007 jumlah perempuan juga lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki yaitu 422,965 untuk perempuan dan 408,990 untuk laki-laki. Dari tahun 2005 ke 2007 baik jumlah laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan.

d. Mata Pencaharian

Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan di Kabupaten Bantul tahun 2005 dan 2007 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun	
		2005	2007
1.	Pertanian	28,08	25,56
2.	Pertambangan dan penggalian	1,05	1,98
3.	Industri	19,23	18,95
4.	Listrik, gas dan air	0,09	0,07
5.	Konstruksi	7,79	8,88
6.	Perdagangan	20,72	21,16
7.	Komunikasi/transportasi	4,20	4,64
8.	Keuangan	1,23	1,61
9.	Jasa	17,01	16,89
10.	Lainnya	0,00	0,27
Jumlah		100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bantul 2009.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 maupun 2007 mata pencaharian sebagai petani mendominasi sebagian besar pekerjaan utama penduduk Kabupaten Bantul yaitu 28,08 untuk tahun

e. Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	2005	2007
		L+P	L+P
1.	Tidak/belum pernah sekolah	28,23	10,88
2.	Tidak/belum tamat SD		
3.	Sekolah Dasar	24,02	6,32
4.	SLTP Umum	17,59	5,22
5.	SLTA Umum	15,21	3,49
6.	SLTA kejuruan	8,42	
7.	D1/D2	1,26	6,05
8.	Akademi/D3	1,7	
9.	D4-S3	3,57	
10.	Tidak sekolah lagi		68,03
Jumlah		100	100

Sumber: BPS Kabupaten Bantul Tahun 2009.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 penduduk yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak/belum tamat SD menempati angka tertinggi yaitu 28,23, ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2005 masih tergolong rendah pada tahun itu. Sedangkan pada tahun 2007 tidak melanjutkan sekolah menempati angka tertinggi yaitu 68,03. Dari segi tidak/belum pernah sekolah atau tidak/belum tamat SD, dari tahun 2005 hingga 2007

f. Pemerintah Daerah

Tabel 2.6

Jumlah kecamatan, desa dan pedukuhan di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pedukuhan	Luas (Km2)
1.	Srandakan	2	43	18,32
2.	Sanden	4	62	23,16
3.	Kretek	5	52	26,77
4.	Pundong	3	49	24,30
5.	Bambanglipuro	3	45	22,70
6.	Pandak	4	49	24,30
7.	Pajangan	3	55	33,25
8.	Bantul	5	50	21,95
9.	Jetis	4	64	21,47
10.	Imogiri	8	72	54,49
11.	Dlingo	6	58	55,87
12.	Banguntapan	8	57	28,48
13.	Pleret	5	47	22,97
14.	Piyungan	3	60	32,54
15.	Sewon	4	63	27,16
16.	kasihan	4	53	32,38
17.	Sedayu	4	54	34,36
Jumlah		75	933	506,85

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaen Bantul 2012.

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 pedukuhan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kecamatan Dlingo mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 Km2. Sedangkan jumlah desa dan pedukuhan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan delapan desa dan 72 pedukuhan. Struktur organisasi kabupaten Bantul terdiri dari 13 Sekertariat Daerah, 3 BUMD, 6 bank, 5 BUMN,

7 Kantor, 3 badan, 14 Dinas, dan 17 Kantor Kecamatan

6. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Sebagai ukuran terwujudnya kabupaten bantul yang sejahtera dan lestari, pembangunan daerah dalam 20 tahun kedepan diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

a. Mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin dengan memanfaatkan sumberdaya local, berwawasan lingkungan, dan menitik beratkan pada pengurangan risiko bencana, serta didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha Esa, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pemerataan pendidkandan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam kesehatan serta meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.
- 3) Meningkatnya dan menguatnya SDM dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Meningkatnya perluasan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja.
- 5) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten maju di Indonesia

- 6) Terbangunnya struktur perekonomian local yang semakin kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif, berdaya saing tinggi, yang dikelola secara efektif dan efisien, sehingga menghasilkan komoditas berkualitas, berdaya saing global dan menjadi motor penggerak perekonomian.
- 7) Berkembangnya perindustrian, perdagangan, pariwisata berbasis masyarakat, agribisnis dan industrialisasi perdesaan serta sector usaha lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- 8) Terwujudnya jaringan infrastruktur yang handal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktifitas produksi dan mampu membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
- 9) Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar diseluruh wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
- 10) Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu system wilayah pembangunan yang berkelanjutan.
- 11) Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang tercermin oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan social dan ekonomi secara

- 12) Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak risiko bencana alam.
 - 13) Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.
 - 14) Mantapnya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis.
 - 15) Pengurangan risiko bencana melalui penataan pemukiman dan merelokasi penduduk dari wilayah rawan bencana.
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 - 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar

- 3) Berkembangnya system dan iklim demokrasi pada' berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, serta masyarakat yang mandiri.
- 4) Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah.
- 5) Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.
- 6) Meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak ditingkat lokal, nasional, dan internasional.
- 7) Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Mantapnya situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat yang didukung penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM).

B. Profil Dinas Sosial Kabupaten Bantul

1. Profil Sejarah Pembentukan Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor : 81 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul

2. Kedudukan

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Tugas Pokok

Dinas Sosial Kabupaten Bantul mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan.

4. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang sosial.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial.
- d. Pelaksanaan kesekretariatan, dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Tujuan

- a. Mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung-jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di

- b. Meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan kemasyarakatan lainnya, sumbangan sosial masyarakat, dunia usaha, serta penetapan standarisasi dan legistasi pelayanan sosial.
- c. Terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan sosial yang cepat melalui wadah jaringan kerja.
- d. Mengidentifikasi jenis data dan informasi yang diperlukan untuk bahan penentuan kebijakan masalah-masalah sosial.
- e. Meningkatkan fungsi koordinasi jaringan kelembagaan dalam upaya pembentukan keterpaduan pengendalian masalah-masalah sosial.
- f. Menyediakan data dan informasi yang benar dan bertanggungjawab kepada masyarakat dan dunia usaha.
- g. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga-lembaga/organisasi perempuan yang memiliki visi, memperkuat peran aktif masyarakat dalam upayan pemberdayaan perempuan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan institusi-institusi pemerintah dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam tiap-tiap proses pembangunan.
- h. Meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga pahlawan, perintis perjuangan dan penerus/pelastorian nilai-nilai kepahlawanan

6. Sasaran

- a. Terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh kembang.
- b. Terlindunginya anak, lanjut usia dari tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah.
- c. Tersedianya pelayanan sosial dan kemudahan untuk mengakses fasilitas umum bagi penduduk lanjut usia dan penyandang cacat.
- d. Meningkatkan kemampuan penyandang cacat agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara layak dan menjadi sumber daya manusia yang produktif.
- e. Terlindunginya hak-hak penyandang cacat ganda untuk hidup secara wajar.
- f. Terpeliharanya nilai-nilai kearifan penduduk lanjut usia dan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kejuangan secara berkesinambungan pada generasi muda dan masyarakat umum.
- g. Pulihnya, terbebasnya dan berdayanya anak nakal dan korban narkoba dari kenakalan dan penyalahgunaan narkoba.
- h. Mandirinya fakir miskin dan kelompok rentan sebagai sumber daya yang produktif.
- i. Meningkatkan kemampuan masyarakat termasuk dunia usaha untuk mememnuhi kebutuhan dasar dalam penyelamatan penyandang masalah sosial, korban akibat bencana, termasuk korban kerusakan

- j. Meningkatnya pendayagunaan potensi dan sumber-sumber sosial masyarakat, yang meliputi TKSM, lembaga perlindungan sosial kemasyarakatan lainnya, sumbangan sosial masyarakat dan dunia usaha dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial, memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah sosial.
- k. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba.
- l. Meningkatnya kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.
- m. Meningkatnya pendayagunaan tenaga-tenaga terdidik dan terlatih dalam menyelenggarakan pelayanan sosial.
- n. Tersedianya data dan informasi kesejahteraan sosial.
- o. Merumuskan standarisasi legislasi pelayanan sosial.
- p. Terumuskannya dan terlaksananya kebijakan penanganan masalah-masalah sosial dalam keselarasan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui wadah jaringan kerja.
- q. Tersusunnya sistem pengelolaan data dan informasi masalah-masalah sosial.
- r. Terwujudnya mekanisme penyelenggaraan sistem informasi masalah-masalah sosial.
- s. Meningkatkan rasa nasionalisme yang diwujudkan dengan menghormati jasa para pahlawan.

- t. Terpeliharanya kerukunan hidup antar umat beragama.
- u. Terwujudnya kebebasan umat beragama untuk menjalankan ibadahnya.
- v. Tersedianya fasilitas peribadatan.

7. Kebijakan

- a. Mengembangkan sistem Bantuan dan Jaminan Sosial bagi PMKS, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
- b. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunya kualitas generasi muda.
- c. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.
- d. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Memfasilitasi kegiatan keagamaan menuju terciptanya kehidupan yang agamis.
- f. Mengembangkan pembinaan kehidupan beragama dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- h. Meningkatkan pelestarian, penghayatan serta pengamalan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
- i. Peningkatan kesejahteraan keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan pejuang.
- j. Intensifikasi sosialisasi nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesertiakawanan sosial.

8. Program

- a. Pengembangan potensi Kesejahteraan Sosial.
- b. Peningkatan Kualitas Manajemen dan Profesionalisme Pelayanan Sosial.
- c. Pengembangan keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial.
- d. Pengembangan sistem informasi masalah-masalah sosial.
- e. Peningkatan peran masyarakat dan perempuan kelembagaan pengarusutamaan gender.

9. Visi dan Misi

a. VISI

Visi dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

“PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI PENYANDANG MASALAH SOSIAL DAN PENINGKATAN KUALITAS KEMERDEKAAN BERBAGAIMAN BANTUL”

Visi ini mengandung sebagai berikut:

Berpedoman pada Amanat UUD 1945 dalam Pembukaan bahwa secara Konstitusi Tugas Pokok dan Fungsi negara adalah :

- 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- 2) memajukan kesejahteraan umum,
- 3) mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
- 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berpijak pada Visi Kabupaten Bantul Projomansari sejahtera Demokratis dan Agamis, maka secara khusus Dinas Sosial mengambil sebagian peran dari Amanat UUD 45 dan Visi Daerah tersebut yakni Peningkatan Kesejahteraan khususnya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peran pada Bidang Agama berusaha menjaga kerukunan umat dan meningkatkan kualitas Kehidupan Umat Beragama.

b. M I S I

Berdasarkan Visi tersebut di atas maka, Dinas Sosial mempunyai Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2) Mengembangkan Prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam

... pembangunan kesejahteraan sosial sebagai investasi modal sosial

- 3) Memperkuat ketahanan sosial dalam upaya memperkecil kesenjangan sosial, dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat rentan dan tidak beruntung, pembinaan semangat kesetiakawanan sosial dan kemitraan semangat kepahlawanan serta wawasan kebangsaan.
- 4) Mengembangkan kerukunan serta meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama.

10. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan Dan Aset
 - 3) Sub Bagian Program
- c. Bidang Pelayanan dan rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban NAPZA.
- d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri atas :
 - 1) Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Bencana;
 - 2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Bidang Pengembangan Sosial dan Agama, terdiri atas :
 - 1) Seksi Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat;
 - 2) Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Pengembangan

f. Unit Pelaksana Teknis.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Gambar 2.7.

